

**LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH
(LKjIP) KECAMATAN SELO
TAHUN 2023**



**KECAMATAN SELO
KABUPATEN BOYOLALI
TAHUN 2024**

KATA PENGANTAR

Segala puji bagi Allah Yang Maha Kuasa atas kehendak-Nya kami dapat melaksanakan tugas pokok dan fungsi Kecamatan Selo Kabupaten Boyolali Tahun 2023 dengan baik untuk mewujudkan sasaran strategis Kecamatan Selo Kabupaten Boyolali sebagaimana tertuang dalam Peraturan Bupati Boyolali Nomor 50 Tahun 2023 tentang perubahan atas perbup no 55 tahun 2021 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Boyolali Tahun 2021-2026. Dalam hal ini kami sampaikan terima kasih kepada semua pihak yang telah bekerja dan berperan mewujudkan sasaran strategis Kecamatan Selo.

Dokumen Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Kecamatan Selo Tahun 2023 disusun sebagai bentuk pertanggungjawaban Kecamatan Selo Kabupaten Boyolali atas keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan program dan kegiatan dalam mencapai sasaran yang telah ditetapkan dalam dokumen Perjanjian Kinerja Tahun 2023 yang telah disepakati di awal tahun anggaran, dan telah diubah dengan Perjanjian Kinerja Perubahan Tahun 2024. Selain itu, dokumen ini disusun guna memenuhi ketentuan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 53 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Dokumen ini berisi informasi tentang perencanaan kinerja yang tertuang dalam beberapa dokumen, perjanjian kinerja, pengukuran kinerja, evaluasi dan analisis akuntabilitas kinerja serta mengemukakan juga permasalahan, upaya pemecahan dan saran. Semoga dokumen ini dapat bermanfaat bagi semua pihak yang memerlukan, utamanya bagi Kecamatan Selo dalam rangka meningkatkan kinerja ke depan.

Kami menyadari, bahwa masih banyak kekurangan pada akuntabilitas kinerja Kecamatan Selo, baik dari aspek kinerja maupun penyajian laporan ini, oleh karena itu kami berharap adanya masukan dari pihak-pihak yang berkepentingan yang dapat menjadi bahan pertimbangan dalam rangka meningkatkan kinerja dan akuntabilitasnya.

Boyolali, 22 Januari 2024
CAMAT SELO

BAMBANG SURATNO, S.Pd.
Pembina
NIP. 19680715 199512 1 006

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI	iii
DAFTAR TABEL	iv
DAFTAR GRAFIK	v
DAFTAR LAMPIRAN	vi
IKHTISAR EKSEKUTIF	vii
BAB I PENDAHULUAN	
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Gambaran Organisasi	2
BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA	
2.1 Perencanaan Strategis Organisasi	6
2.2 Perjanjian Kinerja	7
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	
3.1 Capaian Kinerja Organisasi	9
3.2 Analisis Capaian Kinerja	11
3.3 Realisasi Anggaran	18
BAB IV PENUTUP	
4.1 Simpulan	20
4.2 Saran	20
4.3 Tindak Lanjut Atas Rekomendasi	20

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1	Jumlah Pegawai berdasarkan Jenjang Pendidikan	4
Tabel 1.2	Jumlah Pegawai berdasarkan Pangkat dan Golongan Ruang	4
Tabel 1.3	Jumlah Pegawai berdasarkan Jabatan Struktural	5
Tabel 2.1	Perjanjian Kinerja Perubahan Tahun 2023	7
Tabel 3.1	Pencapaian Kinerja Sasaran 1 dan 2	10
Tabel 3.2	Pencapaian Kinerja Sasaran 1	11
Tabel 3.3	Perbandingan Realisasi Kinerja Sasaran 1	11
Tabel 3.4	Perbandingan Realisasi Kinerja Sasaran 1 Dengan Akhir Periode RPJMD	11
Tabel 3.5	Perbandingan Realisasi Kinerja Sasaran 1 Dengan Realisasi OPD Kabupaten	11
Tabel 3.6	Pencapaian Kinerja Sasaran 2	14
Tabel 3.7	Perbandingan Realisasi Kinerja Sasaran 2	14
Tabel 3.8	Perbandingan Realisasi Kinerja Sasaran 2 Dengan Akhir Periode RPJMD	14
Tabel 3.9	Perbandingan Realisasi Kinerja Sasaran 2 Dengan Realisasi OPD Kabupaten	14
Tabel 3.10	Target dan Realisasi Kinerja SAKIP Kecamatan Selo Tahun 2023.....	16
Tabel 3.11	Realisasi Anggaran Tahun 2023.....	18

DAFTAR GRAFIK

Grafik 1	Realisasi indikator kinerja utama Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) dari tahun 2021 ke tahun 2023	12
Grafik 2	Realisasi indikator utama (Nilai SAKIP) Kecamatan Selo dari tahun 2021 ke tahun 2023	15

DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran 1 Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah 2021-2026
- Lampiran 2 Cascade down IKU Perangkat Daerah 2021-2026
- Lampiran 3 Rencana Kinerja Tahunan Perangkat Daerah Tahun 2023
- Lampiran 4 Perjanjian Kinerja Perangkat Daerah Tahun 2023
- Lampiran 5 Rencana Aksi Perangkat Daerah Tahun 2023
- Lampiran 6 Laporan Monitoring dan Evaluasi atas Rencana Aksi Perangkat Daerah Tahun 2023
- Lampiran 7 Laporan Pengukuran Kinerja Perangkat Daerah Tahun 2023

IKHTISAR EKSEKUTIF

Dalam rangka lebih meningkatkan pelaksanaan pemerintahan yang lebih berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggung jawab serta berorientasi kepada hasil (*result oriented government*), perlu adanya sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah. Sedangkan untuk mengetahui tingkat akuntabilitas tersebut, perlu adanya Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) yang merupakan bahan utama untuk monitoring dan evaluasi sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah. Dengan telah selesainya pelaksanaan tahun anggaran 2023, sesuai Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, semua instansi pemerintah, termasuk Kecamatan Selo, wajib menyusun LKjIP. Selain itu, informasi dalam dokumen LKjIP merupakan bentuk pertanggungjawaban atas keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan tugas.

Visi Bupati Boyolali adalah “Boyolali Maju, Meneruskan Pro Investasi” (Melangkah dan Menata Bersama, Penuh Totalitas (METAL)). Kecamatan Selo dengan tugas pokok melaksanakan visi Bupati Boyolali melalui Misi ke-4 yaitu Boyolali Menghadirkan Pemerintahan Yang Bersih, Efektif Dan Terpercaya dengan sasaran 2 (dua) dan IKU 2021-2026 yang dijabarkan dalam Renstra Kecamatan Selo tahun 2021-2026. Untuk mewujudkan Misi tersebut, pada tahun 2023 Kecamatan Selo Kabupaten Boyolali melaksanakan 4 (empat) program dengan 8 (kegiatan) kegiatan dengan anggaran sebesar Rp. 3.655.186.000,00.

Berdasarkan penilaian sendiri (*Self Assessment*) atas realisasi pelaksanaan Perjanjian Kinerja Tahun 2023, menunjukkan bahwa rata-rata nilai capaian kinerja dari 2 sasaran yang telah ditetapkan adalah 101,06%. Keberhasilan ini disumbangkan oleh 2 (dua) sasaran yang berhasil mencapai nilai kinerja dengan kategori sangat baik.

Berikut Capaian Kinerja per Sasaran :

1. Sasaran “Meningkatnya Kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik” dengan rata-rata capaian kinerjanya 84,15%
2. Sasaran “Meningkatnya Kapasitas Kelembagaan Perangkat Daerah” dengan rata-rata capaian kinerjanya 81,10%

Secara keseluruhan, capaian kinerja dari 2 (dua) indikator kinerja utama sebesar 101,06%. (kategori Sangat tinggi). Sedangkan pembiayaan dari APBD Tahun 2023 termasuk belanja pegawai adalah sebesar Rp.3.655.186.000,00,00 terealisasi Rp.3.638.263.375,00 atau 99,54%.

Dalam rangka mencapai kinerja tersebut terdapat tantangan/hambatan dan peluang/faktor keberhasilan sebagai berikut:

1. Tantangan/Hambatan

Adanya Mutasi Pegawai sehingga diperlukan waktu penyesuaian terhadap pencapaian target program yang telah ditetapkan.

2. Peluang/ Faktor Pendukung

Memperkuat fungsi koordinasi, mengevaluasi pelaksanaan berbagai kegiatan yang dilaksanakan, meningkatkan kualitas, dan sinkronisasi dokumen-dokumen perencanaan dan kinerja.

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang selanjutnya disingkat SAKIP menurut Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, adalah rangkaian sistematis dari berbagai aktifitas, alat, dan prosedur yang dirancang untuk tujuan penetapan dan pengukuran, pengumpulan data, pengklasifikasian, pengikhtisaran, dan pelaporan kinerja pada instansi pemerintah, dalam rangka pertanggungjawaban dan peningkatan kinerja instansi pemerintah. Penyelenggaraan SAKIP meliputi proses penyusunan rencana strategis, perjanjian kinerja, pengukuran kinerja, pengelolaan data kinerja, pelaporan kinerja, serta reviu dan evaluasi kinerja.

Sesuai dengan siklusnya, setelah selesai pelaksanaan tahun anggaran 2023, Perangkat Daerah menyusun LKjIP 2023 yang merupakan laporan kinerja tahunan yang berisi pertanggungjawaban kinerja suatu instansi dalam mencapai tujuan/sasaran strategis Perangkat Daerah. LKjIP berisi ikhtisar pencapaian sasaran sebagaimana yang ditetapkan dalam dokumen perjanjian kinerja. Dokumen LKjIP bukan dokumen yang berdiri sendiri, namun terkait dengan dokumen lain yaitu Indikator Kinerja Utama (IKU), Renstra, Perjanjian Kinerja, dan Rencana Kinerja Tahunan (RKT).

Tujuan penyusunan LKjIP adalah menyajikan pertanggungjawaban kinerja Perangkat Daerah dalam mencapai sasaran strategis instansi sebagaimana telah ditetapkan dalam dokumen Perjanjian Kinerja pada awal tahun anggaran. Dokumen LKjIP ini dapat digunakan sebagai :

1. sumber informasi untuk mengetahui tingkat keberhasilan pencapaian kinerja dengan membandingkan hasil pengukuran kinerja dan perjanjian kinerja;
2. bahan evaluasi untuk mengetahui tingkat akuntabilitas kinerja Perangkat Daerah;
3. bahan evaluasi untuk penyusunan rencana kegiatan dan kinerja Perangkat Daerah pada tahun berikutnya.

Peraturan perundang-undangan yang digunakan dalam penyusunan dokumen LKjIP Kecamatan Selo antara lain:

1. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;

2. Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP);
3. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Penetapan Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
4. Peraturan Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 1 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
5. Peraturan Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 13 Tahun 2023 tentang Perubahan ketiga atas perda nomor 16 tahun 2016
6. Peraturan Bupati Boyolali Nomor 50 Tahun 2023 tentang perubahan atas Peraturan Bupati Boyolali Nomor 55 Tahun 2021 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Boyolali Tahun 2021 – 2026;
7. Peraturan Bupati Boyolali Nomor 100 Tahun 2021 tentang Indikator Kinerja Utama pada Pemerintah Kabupaten Boyolali dan perangkat Daerah Di Kabupaten Boyolali Tahun 2021 - 2026.

1.2. Gambaran Organisasi

Tugas Pokok dan fungsi Kecamatan Selo sesuai Peraturan Bupati Boyolali Nomor 137 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Boyolali adalah meningkatkan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik dan pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan di wilayah kecamatan.

Dalam melaksanakan tugas pokok tersebut, Kecamatan Selo mempunyai fungsi:

- 1) Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan umum;
- 2) Mengoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat;
- 3) Mengoordinasikan upaya penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum;
- 4) Mengoordinasikan penerapan dan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati;
- 5) Mengoordinasikan pemeliharaan sarana dan prasarana pelayanan umum;
- 6) Mengoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan

- oleh Perangkat Daerah di tingkat kecamatan;
- 7) Membina dan mengawasi penyelenggaraan kegiatan desa dan/atau kelurahan;
 - 8) Melaksanakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan kabupaten yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja Pemerintahan Daerah kabupaten yang ada di kecamatan;
 - 9) Menyenggarakan pelayanan publik yang menjadi kewenangan Kecamatan;
 - 10) Melaksanakan tugas lain yang diperintahkan oleh Peraturan Perundang-undangan; dan
 - 11) Mengkoordinasikan Pelaksanaan Pembangunan dan Pemeliharaan Infrastruktur yang ada di Kecamatan.

Susunan Organisasi Kecamatan Selo terdiri dari :

1. Camat
2. Sekretariat terdiri dari:
 - a. Sub bagian Umum dan Kepegawaian;
 - b. Sub bagian Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan.
3. Seksi Pemerintahan.
4. Seksi Ketentraman dan Ketertiban.
5. Seksi Pelayanan.
6. Seksi Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat.
7. Seksi Perekononian, Pembangunan dan Pekerjaan Umum.

Sumber Daya Manusia yang ada di Kecamatan Selo merupakan subyek dalam pencapaian target kinerja Perangkat Daerah. Berikut gambaran kondisi Sumber Daya Manusia berdasarkan jenjang pendidikan, pangkat dan Golongan ruang dan jabatan.

Tabel 1.1.

Jumlah Pegawai berdasarkan jenjang pendidikan

Jenis Pendidikan	Jumlah						Jumlah
	PNS (Non Fungsional)	Fungsional	PPPK	PTT	THL	lainnya	
S2	1	-	-	-	-	-	1
S1/D4	7	-	-	-	2	-	9
D1-D3	3	-	-	-	-	-	3
SMA	4	-	-	-	2	-	6
SMP	2	-	-	-	-	-	2
SD	-	-	-	-	1	-	1
Jumlah	17	-	-	-	5	-	22

Tabel 1.2.

Jumlah Pegawai berdasarkan Pangkat dan Golongan Ruang

No	Pangkat	Golongan Ruang	Laki-laki	Perempuan
1	Pembina Utama Madya	IV/d	-	-
2	Pembina Utama Muda	IV/c	-	-
3	Pembina Tingkat I	IV/b	-	-
4	Pembina	IV/a	2	-
5	Penata Tingkat I	III/d	3	1
6	Penata	III/c	1	1
7	Penata Muda Tingkat I	III/b	2	-
8	Penata Muda	III/a	1	-
9	Pengatur Tingkat I	II/d	3	1
10	Pengatur	II/c	2	-
11	Pengatur Muda Tingkat I	II/b	-	-
12	Pengatur Muda	II/a	-	-
	Jumlah		14	3

Tabel 1.3.

Jumlah Pegawai berdasarkan Jabatan Struktural

No	Nama Jabatan	Jumlah	
		Laki-laki	Perempuan
1	Jabatan Administrator (Eselon 3)	2	-
2	Jabatan Pengawas (Eselon 4)	5	2
3	Jabatan Pelaksana (Staf)	7	1
4	Jumlah	14	3

Tujuan dan Sasaran jangka menengah Pelayanan Kecamatan Selo

1. Meningkatnya Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Publik.
2. Meningkatnya kapasitas Kelembagaan Perangkat Daerah.

BAB II

PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA

2.1. Perencanaan Strategis Organisasi

Visi dan misi Kabupaten Boyolali sebagaimana tercantum dalam dokumen Rencana Strategis Kecamatan Selo Kabupaten Boyolali 2021-2026, sebagai berikut :

a. Visi

Gambaran arah pembangunan atau kondisi masa depan yang ingin dicapai Kabupaten Boyolali melalui penyelenggaraan tugas dan fungsi dalam kurun waktu 5 tahun (2021–2026) yang akan datang sebagaimana tersebut dalam dokumen Rencana Strategis Kecamatan Selo adalah “Boyolali Maju, meneruskan Pro Investasi” (Melangkah dan Menata Bersama, Penuh Totalitas (METAL)).

b. Misi

Misi merupakan rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi yang telah ditetapkan. Rumusan misi dikembangkan dengan memperhatikan faktor-faktor lingkungan strategis, baik eksternal dan internal yang mempengaruhi pembangunan daerah.

Dalam rangka mewujudkan Visi Bupati Boyolali, telah menetapkan 5 Misi sebagai berikut:

- 1) Boyolali Meneruskan Pro Investasi, Maju, Sinergi Dan Berkelanjutan;
- 2) Boyolali Sehat, Tangguh, Cerdas, Berkarakter Dan Berbudaya;
- 3) Boyolali Kota Susu, Lumbung Pangan Nasional;
- 4) Boyolali Menghadirkan Pemerintahan Yang Bersih, Efektif Dan Terpercaya; dan
- 5) Boyolali Tersenyum, Tumbuh, Mandiri Dan Berdaya Saing.

Dari kelima misi tersebut, Kecamatan Selo melaksanakan tugas pokok dan fungsi untuk mendukung Misi 4 yaitu Boyolali Menghadirkan Pemerintahan Yang Bersih, Efektif Dan Terpercaya. Fokus pelaksanaan misi tersebut pada Kecamatan Selo adalah Meningkatnya Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Publik.

Perencanaan strategis merupakan perencanaan untuk periode 5 (lima) tahun. Rencana Strategis Kecamatan Selo Kabupaten Boyolali

sebagaimana tertuang dalam dokumen Rencana Strategis Kecamatan Selo Kabupaten Boyolali Tahun 2021-2026 mempunyai tujuan meningkatnya kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik dengan sasaran sebagai berikut:

1. Meningkatnya kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik
2. Meningkatnya akuntabilitas penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.

Semua sasaran dengan indikator sejumlah 2 dijabarkan lebih lanjut ke dalam program sejumlah 4 (empat) dan kegiatan sejumlah 8 (delapan). Keseluruhan penjabaran tersebut tertuang dalam cascading IKU sebagaimana terlampir.

2.2. Perjanjian Kinerja

Perjanjian Kinerja 2023 Kecamatan Selo disusun berdasar pada Rencana Strategis (Renstra) 2021-2026 dan Dokumen Indikator Kinerja Utama serta dibiayai melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) 2023. Perjanjian Kinerja meliputi 2 (dua) sasaran strategis sebagai berikut:

1. Meningkatnya kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik
2. Meningkatnya akuntabilitas penyelenggaraan Pemerintahan Daerah

Tabel 2.1

Perjanjian Kinerja Perubahan Kecamatan Selo Kabupaten Boyolali Tahun 2023

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	KOORDINATOR
1	2	3	4	5
1	Meningkatnya kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik	Indek Kepuasan Masyarakat (IKM)	82,72	Kasi Pelayanan Kasi Pemerintahan Kasi Ekobang PU Kasi SPM Kasi Trantib
2	Meningkatnya akuntabilitas penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	Nilai Sakip	81,10	Kasubbag Umum & Kepegawaian Kasubbag Renkeulap

Sumber : *Perjanjian Kinerja Perubahan Kecamatan Selo Kabupaten Boyolali Tahun 2023*

Untuk mencapai/mewujudkan target kinerja yang telah ditetapkan tersebut, Kecamatan Selo Kabupaten Boyolali melaksanakan Program dan Kegiatan dengan anggaran sebesar **Rp3.655.186.000,00** yang selengkapnya sebagaimana dokumen Perjanjian Kinerja Perubahan Kecamatan Selo Kabupaten Boyolali Tahun 2023 (terlampir).

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

Akuntabilitas Kinerja merupakan kewajiban untuk mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya dalam mencapai sasaran yang telah ditetapkan. Kinerja Kecamatan Selo Tahun 2023 tergambar dalam tingkat pencapaian sasaran yang dilaksanakan melalui berbagai Program dan kegiatan yang ditetapkan.

3.1. Capaian Kinerja Organisasi

Pengukuran kinerja dilakukan dengan menghitung realisasi dari target baik secara kuantitas/kualitas keluaran (*output*) dan atau hasil (*outcome*) kegiatan/program yang telah dilaksanakan dalam kurun waktu satu tahun. Indikator keluaran (*output*) dan atau hasil (*outcome*) yang diukur berdasar indikator kinerja yang telah ditetapkan dalam dokumen Penetapan Kinerja. Sesuai ketentuan, Indikator Kinerja OPD minimal meliputi keluaran (*output*), sehingga pengukuran kinerja Kecamatan Selo dapat berupa keluaran (*output*) dan hasil (*outcome*) sesuai dokumen Perjanjian Kinerja Perubahan Tahun 2023.

- 1) Keluaran (*Output*) adalah segala sesuatu berupa produk/jasa (fisik dan/atau non fisik) sebagai hasil langsung dari pelaksanaan suatu kegiatan dan program berdasarkan masukan (*input*) yang digunakan;
- 2) Hasil (*outcome*) adalah segala sesuatu yang mencerminkan berfungsinya keluaran (*output*) kegiatan. Hasil (*outcome*) merupakan ukuran seberapa jauh setiap produk/jasa dapat memenuhi kebutuhan dan harapan masyarakat.

Pengukuran pencapaian kinerja dilakukan dengan cara membandingkan antara realisasi kinerja dengan target kinerja pada dokumen Perjanjian Kinerja. Pada tahun Anggaran 2023. Penilaian capaian kinerja menggunakan rumus:

- 1) Apabila semakin tinggi realisasi akan menunjukkan semakin tingginya kinerja atau semakin rendah realisasi akan menunjukkan semakin rendahnya kinerja menggunakan rumus :

$$\text{Capaian Indikator Kinerja} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Rencana}} \times 100\%$$

- 2) Apabila semakin tinggi realisasi akan menunjukkan semakin rendahnya kinerja atau semakin rendah realisasi akan menunjukkan semakin tingginya kinerja menggunakan rumus :

$$\text{Capaian Indikator Kinerja} = \frac{\text{Rencana} - (\text{Realisasi-Rencana})}{\text{Rencana}} \times 100\%$$

Simpulan hasil pengukuran dibagi menjadi 4 (empat) skala pengukuran dengan kategori sebagai berikut :

No	Capaian kinerja	Kategori
1.	91 % keatas	Sangat tinggi
2	76 – 90 %	Tinggi
3	66 – 75 %	Sedang
4	51 – 65 %	Rendah
5	50 % kebawah	Sangat rendah

Pengukuran kinerja disajikan dengan membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun ini, antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun sebelumnya atau beberapa tahun terakhir, realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target akhir periode RPJMD, dan apabila memungkinkan membandingkan antara realisasi kinerja tahun ini dengan realisasi kinerja secara nasional. Sedangkan evaluasi capaian dan akuntabilitas kinerja meliputi analisis penyebab keberhasilan/ kegagalan, analisis efisiensi penggunaan sumber daya, dan analisis program/ kegiatan yang menunjang keberhasilan/ kegagalan diuraikan guna memberikan gambaran efektifitas dan efisiensi pencapaian target kinerja. Secara rinci pencapaian sasaran diuraikan sebagai berikut:

Tabel 3.1
Pencapaian Kinerja Sasaran

No	Sasaran/ Indikator	Target Akhir Periode RPJMD	Target 2023	Realisasi 2022	Realisasi 2023	Realisasi OPD Kabupaten
Sasaran1: Meningkatnya Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Publik						
1	Indek Kepuasan Masyarakat (IKM)	85,00	82,72	84,04	84,15	91,33
Sasaran 2: Meningkatnya Kapasitas Kelembagaan Perangkat Daerah						
2	Nilai Sakip	81,30	81,10	80,20	81,20	86,35

* *Realisasi IKM OPD Kabupaten Tertinggi Kecamatan Musuk nilai 91,33*

* *Realisasi Sakip OPD Kabupaten Tertinggi Sekretaris Daerah nilai 86,35*

3.2. Analisa Capaian Kinerja

Berdasar Dokumen Perjanjian Kinerja Tahun 2022, terdapat 2 sasaran dengan 2 Indikator sebagai Indikator Kinerja Utama Kecamatan Selo, sebagai berikut:

- 1) Sasaran 1 Meningkatnya Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Publik

Tabel 3.2
Pencapaian Kinerja Sasaran 1

Indikator Kinerja Utama	Target 2023	Realisasi 2023	Capaian
Indek Kepuasan Masyarakat (IKM)	82,72	84,15	102%

Tabel 3.3
Perbandingan Realisasi Kinerja Sasaran 1

Indikator Kinerja Utama	Target 2023	Realisasi	
		2022	2023
Indek Kepuasan Masyarakat (IKM)	82,72	84,04	84,15

Tabel 3.4
Perbandingan Realisasi Kinerja Sasaran 1 dengan Akhir Periode RPJMD

Indikator Kinerja Utama	Target Akhir Periode RPJMD 2026	Realisasi sampai dengan 2023	Progres
Indek Kepuasan Masyarakat (IKM)	85	84,15	99

Tabel 3.5
Perbandingan Realisasi Kinerja Sasaran 1 dengan Realisasi OPD Kabupaten

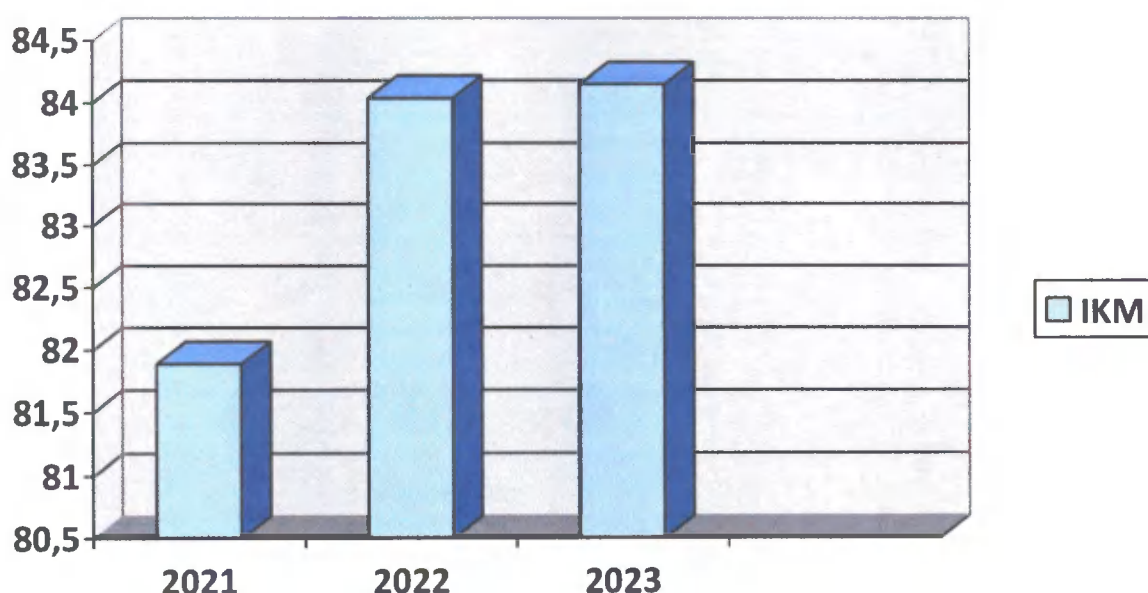
Indikator Kinerja Utama	Realisasi Tahun 2023	Realisasi OPD Kabupaten Tertinggi	Keterangan
Indek Kepuasan Masyarakat (IKM)	84,15	91,33	Lebih rendah 7,18 dengan realisasi tertinggi kabupaten

Dari tabel diatas dapat disimpulkan bahwa capaian kinerja tahun 2023 telah mencapai target yang ditetapkan yaitu sebesar 82,72 dari target RPJMD 2026 sebesar 85,00 terealisasi sebesar 84,15 dengan nilai B, dengan demikian pencapaian indikator kinerja masuk kategori tinggi.

Angka tersebut mengalami kenaikan dari tahun 2022 sebesar 0,11 dimana realisasi tahun 2022 adalah sebesar 84,04. Jika dibandingkan dengan target akhir periode RPJMD 85,00 maka mengalami progres sebesar 99.

Sedangkan jika dibandingkan dengan Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) OPD tertinggi tingkat Kabupaten Boyolali yaitu Kecamatan Selo telah mencapai realisasi sebesar 91,33 maka Kecamatan Selo lebih rendah yaitu sebesar 7,18. Perkembangan capaian kinerja dari tahun ke tahun mengalami kenaikan sebagaimana dapat dilihat pada grafik berikut:

Grafik 1. Realisasi indikator kinerja utama Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) dari tahun 2021 ke tahun 2023



Unsur-unsur yang berperan dalam pencapaian target kinerja adalah sebagai berikut :

- 1) Penilaian IKM dilakukan dengan menggunakan metode survai Kepuasan Masyarakat melalui pelayanan yang ada di Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN), Peran serta masyarakat dalam survai tersebut juga baik termasuk dalam hal masukan saran terhadap pelayanan yang ada di Kecamatan.
- 2) Pengembangan kualitas layanan dukungan di lingkungan pemerintahan Kecamatan Selo yang meliputi pengembangan kapasitas SDM, layanan administrasi dan sarpras perkantoran, perencanaan dan evaluasi, serta data dan informasi.

3) Optimalisasi SOP pelayanan, peningkatan kemampuan personil, ketersediaan sarana dan prasarana pelayanan

Adapun kendala atau hambatan yang ditemui dalam pencapaian target adalah sebagai berikut:

1. Masih terbatasnya sumber daya manusia (SDM) aparatur terkait pelaksanaan program dan kegiatan.
2. Masih kurang maksimalnya melakukan koordinasi dan pendekatan secara efektif kepada masyarakat Kecamatan Selo dalam memberikan ruang aspirasi publik demi mengukur pencapaian strategis ataupun pencapaian pelayanan prima.
3. Kurang optimalnya pelaksanaan koordinasi antar dinas/instansi terkait baik internal OPD maupun eksternal OPD.
4. Masih kurangnya pemahaman dalam mengukur capaian kinerja secara menyeluruh sebagai bagian dalam proses.

Atas hambatan tersebut telah dilakukan upaya mengatasinya dengan cara:

1. Optimalisasi kegiatan pelaporan pelaksanaan program dan kegiatan, baik bulanan, triwulan, semesteran maupun tahunan.
2. Optimalisasi pelaksanaan tugas pokok dan fungsi, sesuai dengan bidang tugasnya berdasarkan ketentuan yang berlaku.
3. Meningkatkan sumber daya aparatur pelaksana program dan kegiatan dengan mengikutsertakan pegawai pada Diklat, Bimtek dan sebagainya.
4. Melaksanakan koordinasi baik internal maupun eksternal OPD.
5. Optimalisasi pelaksanaan program dan kegiatan serta peningkatan pelaksanaan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan program dan kegiatan.
6. Berupaya meningkatkan wawasan dan kompetensi Aparatur serta menyesuaikan kapasitas SDM yang ada dengan kebutuhan fasilitas penunjang pelayanan terkait aparatur yang mampu mengelolanya, dengan melakukan pembinaan teknis administrasi pemerintahan umum secara berkala kepada pegawai kecamatan.

Dalam rangka upaya pencapaian target kinerja utama Kecamatan Selo, dilaksanakan melalui 4 (empat) program dengan 8 (delapan) kegiatan dan 19 (sembilan belas) sub kegiatan. Dari sisi pembiayaan disediakan anggaran sebesar Rp.3.655.186.000,00 dan terealisasi Rp.3.638.263.375,00 dengan capaian 99,54%.

Guna efisiensi dan efektivitas kinerja, maka Kecamatan Selo memanfaatkan sumber daya manusia yang tersedia dengan sebaik-baiknya dan melakukan pembinaan serta peningkatan kapasitas SDM baik secara mandiri maupun melalui keikutsertaan diklat teknis. Demikian juga dengan penggunaan sarana prasarana pendukung kinerja berupa inventaris kantor telah memenuhi dan mendukung ketercapaian target kinerja perangkat daerah.

2) Sasaran 2 Meningkatnya Kapasitas Kelembagaan Perangkat Daerah

Tabel 3.6
Pencapaian Kinerja Sasaran 2

Indikator Kinerja Utama	Target 2023	Realisasi 2023	Capaian
Nilai Sakip Kecamatan Selo	81,10	81,20	100,12%

Tabel 3.7
Perbandingan Realisasi Kinerja Sasaran 2

Indikator Kinerja Utama	Target 2023	Realisasi	
		2022	2023
Nilai Sakip Kecamatan Selo	81,10	80,20	81,20

Tabel 3.8
Perbandingan Realisasi Kinerja Sasaran 2 dengan Akhir Periode RPJMD

Indikator Kinerja Utama	Target Akhir Periode RPJMD 2026	Realisasi sampai dengan 2023	Progres
Nilai Sakip Kecamatan Selo	81,30	81,20	99,87

Tabel 3.9
Perbandingan Realisasi Kinerja Sasaran 2 dengan Realisasi OPD Kabupaten

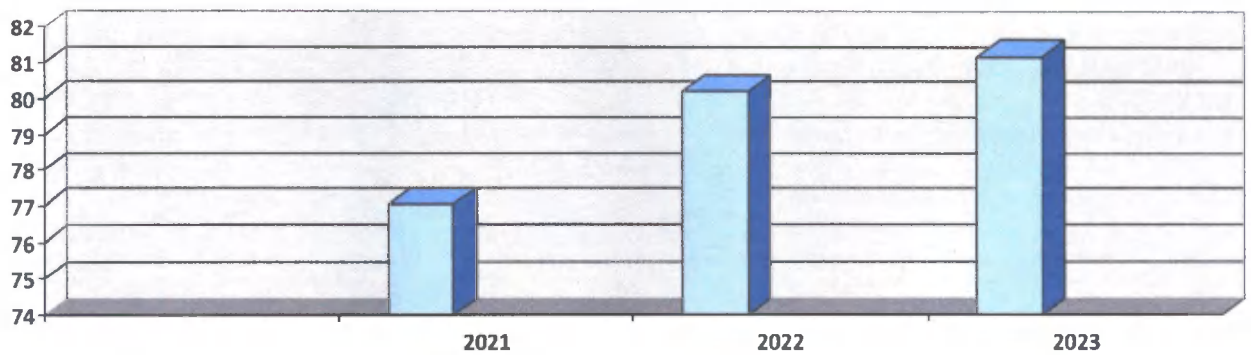
Indikator Kinerja Utama	Realisasi Tahun 2023	Realisasi OPD Kabupaten tertinggi	Keterangan
Nilai Sakip Kecamatan Selo	81,20	86,35	Lebih rendah 5,30

Dari tabel diatas dapat disimpulkan bahwa capaian kinerja sasaran 2 tahun 2023 telah mencapai target yang ditetapkan yaitu sebesar 81,20 dari target RPJMD 2026 sebesar 81,30 terealisasi sebesar 81,20 (nilai B), dengan demikian pencapaian indikator kinerja masuk kategori tinggi.

Angka tersebut mengalami kenaikan dari tahun 2022 sebesar 1,0 dimana realisasi tahun 2022 adalah sebesar 80,20, dengan demikian pencapaian indikator kinerja masuk kategori tinggi. Jika dibandingkan dengan target akhir periode RPJMD maka di tahun 2023 mengalami progres sebesar 99,87. Sedangkan jika dibandingkan dengan Nilai Sakip OPD tertinggi yaitu Sekretariat Daerah (86,35) maka Kecamatan Selo lebih rendah yaitu sebesar 5,30.

Perkembangan capaian kinerja dari tahun ke tahun mengalami penurunan sebagaimana dapat dilihat pada grafik berikut:

Grafik 2.
Realisasi Indikator Kinerja Utama Nilai Sakip Kecamatan Selo
dari Tahun 2021 Ke Tahun 2023



Unsur-unsur yang berperan dalam pencapaian target kinerja adalah sebagai berikut:

- 1) Pengembangan sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (SAKIP) yang berkualitas, dengan menyusun dan mengimplementasikan rencana kegiatan yang konsisten dan selaras dengan renstra Kecamatan.
- 2) Optimalisasi pelaksanaan tugas pokok dan fungsi, sesuai dengan bidang tugasnya berdasarkan ketentuan yang berlaku.
- 3) Penyusunan Perencanaan Kinerja yang dapat memberika informasi strategi, kebijakan dalam pencapaian target kinerja.
- 4) Menetapkan Anggaran dan melaksanakan aktivitas yang mengacu dan mendukung kinerja yang ingin dicapai.

Tabel 3.10
Target dan Realisasi Kinerja SAKIP Kecamatan Selo 2023

No	Program Kegiatan	Target	Realisasi	Capaian
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		100%	100%	100%
A. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		100%	100%	100%
1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	22 Orang/Tahun	22 Orang/Tahun	100%
2	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	13 Dokumen	13 Dokumen	100%
3	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12 Dokumen	12 Dokumen	100%
4	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	12 Dokumen	12 Dokumen	100%
5	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	18 Laporan	18 Laporan	100%
6	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	1 Dokumen	1 Dokumen	100%
7	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	1 Laporan	100%
8	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	1 Dokumen	1 Dokumen	100 %

B. Administrasi Umum Perangkat Daerah		100%	100%	100%
1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	4 Paket	4 Paket	100%
2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	4 Paket	4 Paket	100%
3	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	4 Paket	4 Paket	100%
4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	12 Paket	12 Paket	100%
5	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	4 Paket	4 Paket	100%
6	Penyediaan Bahan/Material	4 Paket	4 Paket	100%
7	Fasilitasi Kunjungan Tamu	4 Laporan	4 Laporan	100%
8	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	4 Laporan	4 Laporan	100%
9	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	13 Dokumen	13 Dokumen	100%
10	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	13 Dokumen	13 Dokumen	100%
C. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		100%	100%	100%
1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	12 Laporan	100%
2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	12 Laporan	12 Laporan	100%
3	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	4 Laporan	4 Laporan	100%
D. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		100%	100%	100%
1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	10 Unit	10 Unit	100%
2	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	27 Unit	27 Unit	100%
3	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	1 Unit	1 Unit	100%
E. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		100%	100%	100%
1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 Dokumen	2 Dokumen	100%
2	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	100%
3	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	100%
4	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	100%
5	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	100%
6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	15 Laporan	15 Laporan	100%
7	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4 Laporan	4 Laporan	100%

3.3 Realisasi Anggaran

Realisasi Belanja Tahun Anggaran 2023 mencapai **Rp.3.638.263.375,00** atau 99,54% dari anggaran yang ditetapkan sebesar Rp.3.655.186.000,00 sehingga terdapat sisa anggaran sebesar Rp.16.922.625,00 atau 0,46%. Rincian realisasi belanja sebagaimana terdapat pada tabel dibawah ini

Tabel 3.11
Realisasi anggaran Tahun 2023

No	Sasaran/Program/Kegiatan	Anggaran	Realisasi	Capaian (%)
1	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Rp. 2.432.586.000	Rp. 2.425.015.875	99,69 %
	Kegiatan :			
	1) Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Rp. 2.098.282.000	Rp. 2.095.785.179	99,88 %
	2) Administrasi Umum Perangkat Daerah	Rp. 199.051.000	Rp. 198.478.865	99,71 %
	3) Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Rp. 40.500.000	Rp. 40.243.000	99,36 %
	4) Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Rp. 18.800.000	Rp. 16.462.441	87,57 %
	5) Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Rp. 75.950.000	Rp. 74.046.390	97,49 %
2	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Rp. 1.100.000.000	Rp. 1.091.170.000	99,20 %
	Kegiatan :			
	1) Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum	Rp. 1.100.000.000	Rp. 1.091.170.000	99,20 %

3	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Rp. 75.000.000	Rp. 74.577.500	99,44 %
	1) Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Rp. 50.000.000	Rp. 49.727.500	99,44 %
	2) Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Rp. 25.000.000	Rp. 24.850.000	99,40 %
4	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Rp. 47.600.000	Rp. 47.500.000	99,79 %
	Kegiatan :			
	1) Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Rp. 47.600.000	Rp. 47.500.000	99,79 %
TOTAL		Rp. 3.655.186.000	Rp. 3.638.263.375	99,54 %

BAB IV

PENUTUP

4.1. Simpulan

Secara umum capaian kinerja Kecamatan Selo masuk dalam kategori sangat tinggi, Berikut simpulan capaian kinerja per sasaran:

Sasaran 1 “Meningkatnya Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Publik” capaian kinerja 101,72% dalam ketegori Sangat Tinggi meliputi 1 (satu) indikator.

Sasaran 2 “Meningkatnya Kapasitas Kelembagaan Perangkat Daerah” capaian kinerja 100,12% dalam ketegori Sangat Tinggi meliputi 1 (satu) indikator.

4.2. Saran

Guna mempertahankan dan atau meningkatkan capaian kinerja serta meningkatkan efektifitas dan efisiensi pelaksanaan program/kegiatan dalam mencapai target kinerja, maka terdapat beberapa hal yang harus dilakukan yaitu:

- a. Melakukan rapat koordinasi dalam semua urusan pemerintahan secara berkala.
- b. Secara berkala mengadakan rapat rutin sebagai bahan evaluasi pelaksanaan dan capaian kinerja.
- c. Meningkatkan pembinaan administrasi pelaksanaan tugas kepada desa.
- d. Meningkatkan pemenuhan sarana dan prasarana pendukung dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat.

4.3. Tindak Lanjut atas Rekomendasi

Berdasarkan hasil evaluasi terhadap akuntabilitas kinerja tahun 2023, maka Kecamatan Selo telah melaksanakan perbaikan sebagai berikut:

- a. Telah dilaksanakan capaian target kinerja ada yang 100% namun beberapa capaian kinerja masih di bawah 100% .
- b. Telah terdapat perbaikan atas pelaporan Kinerja dengan memperbaiki penyusunan Laporan Kinerja Tahun 2023

Boyal, 22 Januari 2024
Kecamatan SELO

BAMBANG SURATNO, S.Pd
Pembina
NIP. 19680715 199512 1 006

LAMPIRAN

1. Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah 2021-2026;
2. Cascade down IKU Perangkat Daerah 2021-2026;
3. Rencana Kinerja Tahunan Perangkat Daerah Tahun 2023;
4. Perjanjian Kinerja Perangkat Daerah Tahun 2023;
5. Rencana Aksi Perangkat Daerah Tahun 2023;
6. Laporan Monitoring dan Evaluasi atas Rencana Aksi Perangkat Daerah Tahun 2023;
7. Laporan Pengukuran Kinerja Perangkat Daerah Tahun 2023;